

Analisis Partisipasi Anggaran dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen

Jamaluddin^{1,*}, Muhammad Iqbal², Adri Patria³, Zakaria Yahya¹, Taufik Jahidin³

¹Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Almuslim, Bireuen

Jalan Almuslim, Matanglumpangdua, Paya Cut, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, Indonesia

²Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Sosial, Universitas Almuslim, Bireuen

Jalan Almuslim, Matanglumpangdua, Paya Cut, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, Indonesia

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Almuslim, Bireuen

Jalan Almuslim, Matanglumpangdua, Paya Cut, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, Indonesia

Email: ^{1,*}jamaluddin.akt@gmail.com, ²muhammadiqbal170280@gmail.com, ³adri.fisipol@gmail.com,

⁴Zakariayahyamsm@gmail.com, ⁵taufikjahidin69@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: jamaluddin.akt@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada BPKD Kabupaten Bireuen baik secara parsial maupun simultan. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil di BPKD Kabupaten Bireuen dengan sampel sebanyak 79 pegawai. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau metode sensus. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi penganggaran (X_1) dan transparansi (X_2) baik secara parsial dan simultan terhadap pengelolaan keuangan (Y) di BPKD Kabupaten Bireuen.

Kata Kunci: Partisipasi Anggaran; Transparansi; Pengelolaan Keuangan.

Abstract—This study aims to determine the effect of budget participation and transparency on financial management at the BPKD of Bireuen Regency, either partially or simultaneously. The population of this study were all civil servants at the Bireuen District BPKD with a sample of 79 employees. The sampling technique in this study used a saturated sampling technique or census method. The methodology in this study uses the quantitative method. From the results of this study it was found that there is an effect of budgetary participation (X_1) on financial management (Y) in BPKD Bireuen Regency.

Keywords: Budget Participation; Transparency; Financial Management.

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspon dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal (Zainir, 2016).

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menengakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (Nordian, 2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi daerah merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Maksud dari Pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengendalian terhadap penyelenggaraan keuangan daerah dapat dilakukan dari luar maupun dari dalam. Dari luar dilakukan oleh DPRD dan masyarakat, sedangkan pengawasan dari dalam dilakukan oleh inspektorat yang ada di daerah Menurut Halim (2007). Pengelolaan keuangan daerah sama seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa semua bentuk penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Partisipasi penganggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawab dengan tujuan organisasi secara menyeluruh. Partisipasi bawahan akan meningkatkan kebersamaan, menumbuhkan rasa memiliki, inisiatif untuk menyumbangkan ide dan keputusan yang

dihasilkan dapat diterima. Partisipasi anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan, dimana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui maka seluruh elemen akan menginternalisasi tujuan yang ditetapkan, dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut terlibat dalam penyusunan anggaran (Sulistoni, 2003).

Transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam Upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Research gap dalam penelitian ini terlihat dari penelitian Hidayati (2015) menemukan bahwa pengaruh partisipasi anggaran secara parsial terhadap efektifitas anggaran tergolong lemah dengan koefisien korelasi parsial. Selanjutnya penelitian dari Debi (2015) dan Gerryan (2015) menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Suparno (2012) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Bireuen pada umumnya terdapat kelemahan dalam penyusunan Anggaran yaitu para pegawai yang ditugaskan untuk mempersiapkan dan menyusun anggaran belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku, serta masih ada pegawai yang menganggap remeh keterlibatannya dalam penyusunan Anggaran. Selain itu, kelemahan dalam penyusunan Anggaran terjadi karena pegawai yang berwenang dalam penyusunan Anggaran tidak semua sesuai dengan kualifikasi.

Permasalahan Transparansi pada badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten bireuen ialah masih kurangnya informasi di setiap pengeluaran dan pendapatan belanja daerah belum sepenuhnya transparan baik untuk diakses oleh masyarakat maupun dalam ruang lingkup BPKD itu sendiri. Apabila tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan tersebut maka dapat menghambat kebutuhan atas keterlibatan partisipasi anggaran dalam sektor publik.

Berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diutuskan ke Kabupaten Bireuen, masih menemukan beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bireuen, walaupun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi laporan keuangan Bireuen, menurut Syarifuddin Lubis, SE,MSi.,Ak.,CA, permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan (BPK) berupa temuan pemeriksaan dan Sistem Pengendalian Interen (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Adapun temuan Sistem Pengendalian Interen (SPI) antara lain;(1) pengelolaan uang di bendahara belum sepenuhnya tertib. (2) penagih utang pajak restoran belum optimal, dan (3) pengelolaan asset berupa peralatan dan mesin yang hilang yang dikuasai oleh pihak lain belum sepenuhnya memadai. Masalah kepatuhan yang melenceng dari anggaran pemerintah antara lain; (1) kelebihan pembayaran belanja pegawai pada PNS cuti bersama dan tugas belajar. (2) kelebihan pembayaran pada badan penanggulangan bencana daerah. Dalam penyusunan anggaran setiap tahunnya tim anggaran eksekutif (tim pemerintah kabupaten). Menerima input dari setiap SKPD selanjutnya usulan tersebut dirumuskan kembali oleh tim anggaran kabupaten (TAPA) untuk menyusun RAPBD.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparat daerah, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Rulyanti, 2017).

Sesuai dengan teori yang didapat mengenai partisipasi anggaran, maka dapat ditentukan indikator partisipasi anggaran (Brownell dalam Falikhatun, 2007), yaitu;

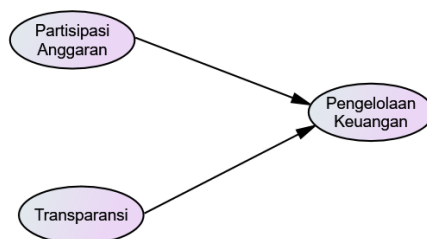
1. Keterlibatan
Keuangan organisasi dalam anggaran pendapatan dan belanja juga merupakan pembiayaan setiap program dan kegiatan organisasi.
2. Pengaruh
Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut.
3. Komitmen

Karena identifikasi dan ego-keterlibatan dengan tujuan anggaran, partisipasi berkaitan dengan akuntabilitas dan begitu mengarah pada peningkatan motivasi dan komitmen terhadap budget.

Selanjutnya menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut;

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
3. Kemudahan akses informasi.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2.2 Metode Analisis

Penelitian ini bersifat kuantitatif karena pengukuran variabel-variabel penelitian dalam bentuk angka dan melakukan analisis dalam bentuk statistik. Pendekatan penelitian ini melalui beberapa tahapan yakni mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner, menganalisis data, dan pengujian hipotesis. Tujuannya untuk mengetahui keterkaitan Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

Menurut Sugiyono (2016) pengujian ini dilakukan setelah data dikumpulkan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*) atau metode kuadrat terkecil biasa. Model persamaannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \tag{1}$$

Keterangan;

Y = Pengelolaan Keuangan

a = Konstanta

b₁, b₂ = Parameter (Koefisien regresi)

X₁ = Partisipasi Anggaran

X₂ = Transparansi

e = Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Uji Reliabilitas

Pada program SPSS menggunakan metode *Cronbach Alpha*, dimana suatu kuesioner dikatakan reliable jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 (Sugiyono, 2016).

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Conbrach's Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
Partisipasi Anggaran (X ₁)	0.672	0.60	Realibel
Transparansi (X ₂)	0.636	0.60	Realibel
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.713	0.60	Realibel

Berdasarkan Tabel 1 diatas uji reliabilitas dari tanggapan responden terhadap kuesioner yang telah di bagikan kepada seluruh responden pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen yaitu, untuk variabel Partisipasi Anggaran (X₁) sebesar 0,672 > 0,60, variabel Transparansi (X₂) sebesar 0,636 > 0,60, dan untuk variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,713 > 0,60. Dengan demikian hasil dari uji reliabilitas untuk semua variabel dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan.

3.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas diuji dengan statistic non parameter yaitu uji *kolmogorof smirnof* (K-S) Z dan *Asymp Sig* (2-tailed), variabel dinyatakan terdistribusi secara normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 pada signifikan 95%. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Studentized Deleted Residual		
N		79
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0028254
	Std. Deviation	1.01765787
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.057
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		

Hasil dari uji kolmogorov-smirnov test dapat dilihat pada tabel 2 diperoleh dari nilai test statistik sebesar 0,070 dengan probabilitas sebesar 0,200 yang lebih besar dengan 0,05 ini memberi arti bahwa residual terdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Untuk mendekteksi adanya gejala multikolinieritas tergantung dari besarnya *Variance Inflating Facror* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai nilai *Variance Inflating Factor* (VIF) disekitar angka dan mempunyai angka toleransi mendekati 1.

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Partisipasi Anggaran	.947	1.056
Transparansi	.947	1.056
a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah		

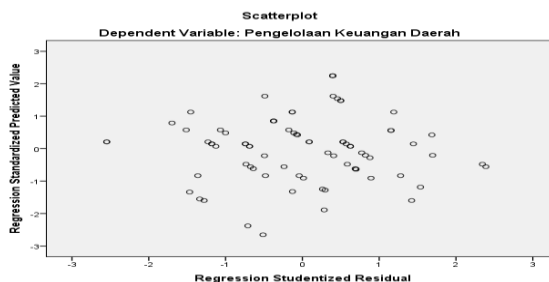
Sesuai dengan ketentuan uji multikolinieritas, jika nilai tolerance ≥ 0.10 dan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terdapat multikolinieritas. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat sebagai berikut;

1. Partisipasi Anggaran (X_1), nilai *tolerance* sebesar 0,947 (lebih besar dari 0.10) dan nilai VIF sebesar 1,056 (lebih kecil dari 10), artinya tidak terjadi multikolinieritas.
2. Transparansi (X_2), nilai *tolerance* sebesar 0,947 (lebih besar dari 0.10) dan nilai VIF sebesar 1,056 (lebih kecil dari 10), artinya tidak terjadi multikolinieritas.

Jadi kesimpulannya bahwa kedua variabel dependen yaitu Partisipasi Anggaran dan Transparansi tidak terjadi multikolinieritas. Jadi tidak terjadi masalah antar variabel independen dalam model regresi.

c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Salah cara untuk mendeteksi atau tidaknya heterokedastisitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel tidak bebas (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dereksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah di prediksi dan sumbu X adalah residualnya (Y prediksi Y sesungguhnya). Jika ada pola tertentu, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Gambar 2 di atas, terlihat bahwa hasil pengujian heterokedastisitas mengenai Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen, tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Hasil Uji Regresi

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen yaitu Partisipasi Anggaran (X₁) dan Transparansi (X₂) pada variabel dependen yaitu Pengelolaan Keuangan (Y) hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	.905	.595		1.522	.132		
Partisipasi Anggaran	.225	.098	.220	2.299	.024	.947	1.056
Transparansi	.576	.112	.493	5.149	.000	.947	1.056

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil perhitungan koefisien regresi berganda diatas memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah 0,905 koefisien variabel Partisipasi Anggaran (X₁) sebesar 0,225, variabel Transparansi (X₂) sebesar 0,576. Sehingga diperoleh persamaan Regresi :

$$Y = 0,905 + 0,225X_1 + 0,576X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh dari variabel Partisipasi Anggaran dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu konstanta sebesar 0,905. Maka setiap terjadi peningkatan Partisipasi Anggaran (X₁) sebesar 0,225. Dan Transparansi (X₂) sebesar 0,576 akan diikuti Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,905.

e. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *adjusted R square* pada analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5sebagai berikut;

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinan (R²)

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.584 ^a	.341	.324	.23031	1.804	

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Partisipasi Anggaran
b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, koefisien determinan *Adjusted R Square* sebesar 0,324 (32,4%). Maka hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 32,4%. Sedangkan sisanya sebesar 67,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel independen dalam penelitian ini.

f. Hasil Uji Hipotesis

1) Hasil uji simultan (Uji F)

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji *F-test*. Menurut Sugiyono (2016) uji statistik *F* pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Menurut Sugiyono (2016) uji *F* dilakukan dengan membandingkan signifikansi *F*_{hitung} dengan *F*_{tabel} dengan ketentuan;

H₀ diterima dan H_a ditolak jika *F*_{hitung} < *F*_{tabel} untuk α = 0,05

H₀ ditolak dan H_a diterima jika *F*_{hitung} > *F*_{tabel} untuk α = 0,05

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.085	2	1.042	19.653	.000 ^b
Residual	4.031	76	.053		
Total	6.116	78			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Predictors: (Constant), Transparansi, Partisipasi Anggaran

Berdasarkan tabel 6 hasil uji F dengan nilai F_{hitung} sebesar 19,653 dan nilai F_{tabel} 3,12 dengan nilai signifikan 0.000 maka dapat disimpulkan berdasarkan Tabel 4.16 hasil uji F dengan nilai F_{hitung} sebesar 19,653 dan nilai F_{tabel} 3,12 dengan nilai signifikan 0.000, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan secara simultan variabel independen yang terdiri dari partisipasi anggaran dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan artinya besar kecilnya semua variabel independen tersebut secara simultan mempengaruhi pengelolaan keuangan pada tahun mendatang.

2) Hasil Uji Parsial (Uji t)

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji *t-test*. Menurut Sugiyono (2016) uji statistik *t* pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2016) uji *t* dilakukan dengan membandingkan signifikansi t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan:

H_0 diterima dan H_a ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ untuk $\alpha = 0,05$

H_0 ditolak dan H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ untuk $\alpha = 0,05$

Tabel 7. Uji t (Uji Parsial)

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.905	.595		1.522	.132
Partisipasi Anggaran	.225	.098	.220	2.299	.024
Transparansi	.576	.112	.493	5.149	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat diketahui kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen;

1. Partisipasi anggaran (X_1)

Berdasarkan Tabel 7 hasil perhitungan secara parsial variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah, yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t_{hitung} sebesar 2,299 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,99167 yang artinya $2,299 > 1,99167$ dengan nilai probabilitas sebesar 0,024. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa H_0 di tolak dan H_1 diterima.

2. Transparansi (X_2)

Berdasarkan Tabel 7 hasil perhitungan secara parsial variabel transparansi berpengaruh terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah, yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t_{hitung} sebesar 5,149 dan nilai t_{tabel} 1,99167 yang artinya $5,149 > 1,99167$ dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Dari hasil analisis dapat di simpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa H_0 di tolak dan H_1 diterima.

3.2 Pembahasan

Bagian ini merupakan bagian sangat penting dalam suatu penelitian, dimana pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian yang telah diperoleh melalui alat analisis SPSS V.22 for Windows. Pembahasan pada bagian ini akan menekankan pada pengujian hipotesis yang telah dibentuk dengan maksud untuk mendapat jawaban atas pernyataan hipotesisi penelitian ini.

1) Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Pengelolaan keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan diatas diperoleh hasil bahwa variabel Partisipasi Anggaran (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y) pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen. Berdasarkan hasil penelitian, koefisien determinan *Adjusted R Square* sebesar 0,341 (34.1%) dan berpengaruh positif. Artinya jika semakin tinggi Partisipasi Anggaran dan maka semakin tinggi pula Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor BPKD Kabupaten Bireuen. Sedangkan sisanya sebesar 65,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel independen dalam penelitian ini.

Dari hasil pengujian Uji t diketahui untuk melihat pengaruh variabel Partisipasi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t yaitu diperoleh yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t_{hitung} sebesar 2,299 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,99167 yang artinya $2,299 > 1,99167$ dengan nilai probabilitas sebesar 0,024. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya pengaruh Partisipasi Anggaran (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Selain itu juga diperoleh persamaan regresi $Y = 0,905 + 0,225X_1 + 0,576X_2 + e$ persamaan tersebut sesuai dengan persamaan linear berganda yaitu $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil uji t terdapat pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen. Penelitian ini didukung dari penelitian Rifkayanti Amrullah (2009).

2) Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan diatas diperoleh hasil bahwa variabel Transparansi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y) pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan hasil penelitian, koefisien determinan *Adjusted R Square* sebesar 0.341 (34.1%) dan berpengaruh positif. Artinya jika semakin tinggi Partisipasi Anggaran dan maka semakin tinggi pula Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor BPKD Kabupaten Bireuen. Sedangkan sisanya sebesar 65.9% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel independen dalam penelitian ini.

Dari hasil pengujian Uji t diketahui untuk melihat pengaruh variabel Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t yaitu diperoleh yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t_{hitung} sebesar 5.149 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,99167 yang artinya $5,1499 > 1,99167$ dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya pengaruh Transparansi (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Selain itu juga diperoleh persamaan regresi $Y = 0,905 + 0,225X_1 + 0,576X_2 + e$ persamaan tersebut sesuai dengan persamaan linear berganda yaitu $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil uji t terdapat pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen. Penelitian ini didukung dari penelitian Rika Ardiyanti (2009).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen sebagai berikut Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen yang ditunjukkan dengan besar nilai t_{hitung} sebesar 2,299 dan nilai t_{tabel} 1,99167 yang artinya $2,299 > 1,99167$ dengan nilai probabilitas sebesar 0,024. Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t_{hitung} sebesar 5,149 dan nilai t_{tabel} 1,99167 yang artinya $5,149 > 1,99167$ dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Partisipasi anggaran dan Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada BPKD kabupaten Bireuen dengan hasil uji F dengan nilai F_{hitung} 19,653 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,12 dengan nilai signifikan 0.000.

REFERENCES

- Debi Putri Pertiwi (2015). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris Skpd Provinsi Riau)*. Vol. 2 No. 2 <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=384660&val=6445&> Diakses 20 November 2016.
- Falikhatus, (2007). "Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Budegtary Slack dengan Variabel Pemoderasi Ketidakpastian Lingkungan dan Kohesivitas Kelompok". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 6 Nomor 2. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Gerryan, Putra. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu*. Vol 4 (2f) . <http://iom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/issue/current>. Diakses 20 November 2016.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*., Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Hidayati, Sri. Basuki, Prayitno & Pancawati, Sri. *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Pemahaman Penyusun Rencana Kerja Anggaran (Rka) Dan Asimetri Informasi Terhadap Efektifitas Anggaran SKPD Di Pemerintah Kota Mataram*. *Jurnal InFestasi* Vol. 11, No.1, Juni 2015 Hal. 93 - 111 93.
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Nordiawan, Dedi dkk, 2007. *Akuntansi Pemerintahan* , Jakarta : Salemba Empat. Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rulyanti, 2017. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa sebagai variable intervening*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol 11 no 3.
- Siregar, Liper. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangasiantar*. Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sulistoni, G., 2003. *Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, Nusa Tenggara Barat : SOMASI.
- Suparno. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan*. Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
- Zainir, Jamaluddin. 2016. *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada DPKAD Kota Lhokseumawe*. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*.